

## ABSTRAK

Majelis Pengawas Daerah salah satu badan yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Notaris di daerah Kabupaten/Kota. Ternyata dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan ini, ditemukan beberapa permasalahan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cirebon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menganalisis pelaksanaan peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris. 2) menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 3) Untuk menganalisis Hambatan dan Solusi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris yaitu penelitian yang mengutamakan kepada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer. Metode pendekatan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari: Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dan penelitian lapangan yang objek penelitiannya Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Cirebon, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka.

Adapun hasil penelitian adalah 1) pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Cirebon didasarkan pada Undang-undang No.2 Tahun 2014, yaitu melaksanakan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN. 2) Beberapa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cirebon dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris adalah: a) Menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri, b) melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap Notaris-Notaris yang berada di bawah kewenangannya. 3) Faktor-faktor lain yang menjadi hambatan bagi MPD Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pengawasan dan pembinaan Notaris antara lain: 1) Notaris kurang bisa manage waktu antara kegiatan Notaris dengan waktu pemeriksaan. 2) Notaris juga ditemui kurang rapi dalam membuat Protokoler Notaris. Adapun untuk solusi terhadap hambatan tersebut diatas adalah 1) Sebaiknya Notaris membuat jadwal untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 2) Notaris lebih mendalami dan mempelajari kembali teori tentang pembuatan Protokoler Notaris. 3) Majelis Pengawas Wilayah sebaiknya rutin untuk menindaklanjuti hasil temuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

**Kata Kunci : MPD, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi**

## ***ABSTRACT***

The Regional Supervisory Board is one of the bodies authorized to conduct guidance and supervision of the performance of Notaries in the Regency / City area. It turned out that in carrying out this guidance and supervision, several problems were discovered by the Cirebon District Notary Regional Supervisory Board.

The purpose of this study is to: 1) analyze the implementation of the role of the Cirebon Regency Regional Supervisory Board in the Framework of Guidance and Supervision of Notaries. 2) analyze what efforts have been made by the Cirebon Regency Regional Supervisory Board in the framework of guiding and supervising Notaries. 3) To analyze the Obstacles and Solutions of the Cirebon District Supervisory Board in the framework of guidance and supervision of Notaries.

This research is an empirical research that is research that prioritizes research in the field to obtain primary data. Approach method is an empirical juridical approach method. The specifications needed in this study are descriptive analytical. In this study the data source consisted of: Primary data obtained by researchers through interviews and field research that the object of research was the Blood Oversight Board (MPD) in Cirebon Regency, and secondary data obtained through literature.

The results of the study are 1) the implementation of supervision and development of the Cirebon Regency Regional Supervisory Board (MPD) based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.39.PW.07 of 2004, namely implementing authority, as referred to in Article 13 paragraph (2), Article 14, Article 15, Article 16 and Article 17 and Article 70 and Article 71 UUJN. 2) Some of the efforts that will be carried out by the Regional Supervisory Board of the Cirebon District Notary in the framework of guiding and supervising Notaries are: a) Implementing preventive and curative supervision, namely preventing the occurrence of violations of Notary positions and providing guidance to the Notary itself, b) conduct socialization to parties related to the Notary profession, including elements of society, Academic elements, Police of the Republic of Indonesia, and especially to Notaries under their authority. 3) Other factors that become obstacles for MPD Cirebon Regency in carrying out its duties and obligations in the supervision and guidance of Notaries include: 1) Notaries are unable to manage the time between Notary activities and the time of examination. 2) Notaries were also found to be less tidy in making the Notary Protocol. As for the solutions to the obstacles mentioned above are 1) It is recommended that the Notary make a schedule for the activities to be carried out. 2) The notary is more in-depth and re-studies the theory about making a Notary Protocol. 3) The Regional Supervisory Board should routinely follow up the findings of the Notary Regional Supervisory Board.

***Keywords:* MPD, Coaching and Supervision, Sanctions**